



Buletin Parlementaria

Nomor 998/II/III/2018 • Maret 2018

DPR KOMITMEN Laporkan SPT Pajak Tepat Waktu



TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339005

Potensi Bahaya Jika NIK dan KK Disalahgunakan

DPR Komitmen Laporkan SPT Pajak Tepat Waktu

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan kegiatan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 yang diselenggarakan di loby Nusantara III Gedung DPR RI adalah sebagai bentuk kepatuhan hukum dan keteladanan lembaga perwakilan rakyat kepada publik dalam melaporkan pajak.

“Kegiatan yang kita lakukan sekarang ini merupakan bentuk komitmen kita sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk taat dan patuh dalam kapasitas sebagai warga negara untuk melaporkan SPT kita sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” ucap Bamsoet, Kamis (8/3).

Turut hadir dalam acara kegiatan penyampaian SPT Pajak Tahunan ini, antara lain Wakil-wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon, Korinbang Agus Hermanto, dan Korkesra Fahri Hamzah, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, pejabat dan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR.

Bamsoet menyatakan, kegiatan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2017 tersebut adalah wujud

komitmen dirinya selaku Ketua DPR dalam memastikan bahwa seluruh anggota DPR dan karyawan DPR untuk melaporkan SPT tahun 2017 tepat waktu.

“Saya bertanggungjawab secara moril terhadap kepatuhan seluruh anggota DPR dan karyawan meskipun sesungguhnya menjadi tanggungjawab setiap individu untuk melaporkan SPT Tahunannya. Ketaatan kita dalam menyampaikan SPT Tahunan disertai ketaatan membayar pajaknya menunjukkan kita turut serta dalam mengelola negara ini. Salah satu pendapatan negara yang setiap tahunnya masuk dalam APBN adalah bersumber dari pajak kita,” tandasnya.

Ia juga menerangkan bahwa APBN tahun 2018 sudah mencapai Rp 2000 triliun lebih atau sekitar 2.220,6 triliun,

yang bertujuan mendorong roda perekonomian negara yang saat ini tumbuh sekitar 5,2%. Masih diperlukan upaya keras untuk meningkatkannya, karena dalam APBN 2018 ditargetkan 5,4%.

“Pada APBN 2018, target penerimaan dari sektor pajak dipatok sebesar Rp 1.423 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sangat dominan,” paparnya.

Dari target penerimaan negara Rp 1.894,7 triliun, sekitar Rp 1.618,1 triliun berasal dari perpajakan yang tumbuh sekitar 10% dibandingkan APBN 2017, lanjutnya. Setoran pajak 2018 ditargetkan mencapai Rp 1.423,9 triliun. Sementara itu untuk penerimaan bea masuk ditargetkan sebesar Rp 35,7 triliun dan bea keluar Rp 3 triliun. Cukai sendiri ditargetkan pada 2018 bisa mencapai Rp 155,4 triliun.

“Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk membantu pemerintah mewujudkan berbagai target tersebut. Apalagi APBN merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR, maka lembaga perwakilan rakyat harus turut memberi contoh untuk mewujudkan berbagai tujuan yang hendak dicapai yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

■ (dep/sc)



Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi, Pimpinan AKD dan Anggota DPR melaporan SPT Tahunan Pribadi kepada Dirjen Pajak.

Fadli Zon Minta Kepala BNN Gandeng TNI Perangi Narkoba

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru Irjen Pol Heru Winarko bisa mengambil tindakan lebih tegas dan berani memerangi peredaran narkoba yang merajalela di Indonesia. Ia pun berharap, Heru dapat melibatkan TNI dalam pemberantasan narkoba.

“Kepala BNN yang baru, saya kira harus mengambil langkah kuat, berani dan tegas jika perlu melibatkan TNI dalam beberapa pemberantasan narkoba. Kita tidak ingin Indonesia menjadi narkorepublik,” ujar Fadli usai menghadiri pelantikan Kepala BNN Heru Winarko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3).

Fadli menilai, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pasar narkoba. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penyelundupan narkoba berton-ton ke Indonesia. Karena itu, ia berharap TNI dapat dilibatkan untuk melakukan pengamanan di wilayah laut dan darat, khususnya di daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

“Jaringan mafia bisnis internasional sedang mengarah ke Indonesia, mengeruk keuntungan luar biasa tetapi menghancurkan generasi kita. Ini adalah apa yang disebut perang alternatif dan sekarang harus menjadi prioritas dan tantangan utama kita,” tandas Fadli.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Budi Waseso yang kini memasuki masa pensiun. Pelantikam ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 M 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNN. ■ (ann/sf)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,
Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI
Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,
Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom, Erman Suhendri, S.Sos.I,
Mustaqim, S.Kom.I

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

Pantau Distribusi Parlementaria



Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat (bawah) dan Perpustakaan Universitas Negeri Andalas (atas), Padang, Sumbar (26 Februari - 1 Maret 2018).

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Potensi Bahaya Jika NIK dan KK Disalahgunakan



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan meminta Komisi I untuk memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menjelaskan kebijakan mengenai kewajiban registrasi kartu seluler yang menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

“Pimpinan DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil Kemenkominfo untuk menjelaskan secara tuntas mengenai hal itu,” ujar Bamsoet saat ditemui di lobby Nusantara III, Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).

Bamsoet mengatakan kebijakan untuk registrasi ulang menimbulkan tanda tanya di masyarakat dan menimbulkan potensi bahaya jika data itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kita juga nanti menanyakan ke Kemenkominfo mengenai isu bocornya data tersebut. Hal ini bisa membahayakan kepentingan nasional negara ini,” tegas Bamsoet.

Bamsoet menyesalkan jika isu penyalahgunaan data ini memang benar terjadi. Salah satu pengguna twitter yang kebetulan pelanggan Indosat Ooredoo misalnya sempat berkicau NIK dan nomor KK dipakai oleh 50 nomor, sedangkan ia hanya mengaku memiliki satu nomor.

“Ini satu hal yang mengejutkan bahwa niat baik kita sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan untuk memenuhi permintaan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap

kepemilikan nomor *handphone*, dimana kita mempunyai data yang sangat penting yaitu NIK dan No. KK, bisa diakses dan bisa bocor kemana-mana, itu merupakan suatu pelanggaran yang harus diselidiki,” tegasnya.

Bagi para pelanggan sebaiknya segera mengecek ke operator, berapa banyak nomor prabayar yang menggunakan data NIK dan KK. Kalau memang cuma nomor perseorangan yang terdaftar artinya aman. Caranya untuk Telkomsel: <https://telkomsel.com/cek-prepaid> atau ketik *444#. Indosat Ooredoo: ketik INFO#NIK kirim ke 4444 atau <https://myim3.indosatooredoo.com/ceknomor/index>. Untuk operator XL Axiata: ketik *123*4444#. Operator Tri Indonesia: <https://registrasi.tri.co.id/ceknomor> dan Smarfren: https://my.smartfren.com/check_nik.php

Jika setelah melakukan berbagai langkah di atas menemukan ada nomor aneh yang terdaftar menggunakan KK dan NIK, segera hubungi operator untuk dilakukan pemblokiran. Langkah ini sesuai Peraturan Menkominfo No. 12 tahun 2016 pasal 11 ayat 3. ■ (mhr/sr)

“Pemerintah dan masyarakat harus siap ketika ada persoalan digantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi,” ungkap Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR itu, ketika menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 pada Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Bamsoet, *Executive Chairman Word Economic Forum* Klaus Schwab mengatakan, saat ini umat manusia berada dalam permulaan dari revolusi yang akan mengubah secara fundamental cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain.

“Basis Revolusi Industri 4.0 adalah digitalisasi, ilmu komputer dan analisis big data. Disebut revolusi karena kemungkinan dampak sangat besar bagi peradaban manusia. Revolusi ini akan berjalan sangat cepat, dengan menekankan pada

“Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Dengan demikian, maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerima.”



Revolusi Industri 4.0, Realitas yang tak Dapat Dielakkan

DPR RI mengajak pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka mata akan hadirnya realitas baru, yang disebut Revolusi Industri 4.0. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Revolusi Industri 4.0 hadir sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan.

kemampuan *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Dijelaskan juga, bahwa teknologi ini mampu menggerakkan robot-robot yang jauh lebih pintar dari manusia dan tak mengenal lelah. Dunia usaha dihadapkan pada tantangan yang disebut *disruptive technology*. Disebutkan Bamsuet, hal yang tampak di depan mata adalah polemik terkait transportasi daring (online). Juga warna baru dalam industri pariwisata yang berbasis *sharing economy* yang muncul seperti Airbnb.

Namun di sisi lain, Bamsuet tak memungkiri masih adanya isu kesenjangan sosial yang kian meningkat. Ia menyebutkan, jangankan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi, untuk bertahan hidup dalam persaingan antar tenaga kerja sesama manusia sudah sulit.

Karena itu, DPR menyambut baik inisiatif yang gencar dilakukan Kementerian Perindustrian dengan membuka dialog soal Revolusi Industri 4.0 dengan dunia usaha dan dunia Pendidikan. Begitu juga inisiatif Kementerian Keuangan dalam menginisiasi program perlindungan sosial.

“Langkah yang diambil Kemenkeu melalui Dirjen Anggaran, adalah upaya solutif menyelesaikan permasalahan krusial pada masa kini dan masa datang, yaitu kesenjangan sosial,” ungkap Bamsuet.

Ditambahkan pula, kesenjangan sosial

menjadi isu dari tahun ke tahun, juga dengan bergantinya pemerintahan dari waktu ke waktu. Pilihan kebijakan yang dimiliki pemerintah adalah mengubah yang bersifat umum, secara bertahap menjadi bantuan sosial yang mengarah pada sasaran lebih spesifik.

“Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Dengan demikian, maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerima,” pungkas politisi dapil Jateng itu. ■ (mp/sf)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

TKA Tidak Boleh Gantikan Pekerja Lokal



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati saat mengambil kebijakan memudahkan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia, untuk bekerja di sektor minyak dan gas bumi. Ia mengingatkan pemerintah, jangan sampai TKA bisa berkeliaran dengan mudah mencari pekerjaan dan kemudian menggantikan pekerja lokal.

Pencabutan regulasi itu katanya untuk mendorong investasi sektor minyak dan gas bumi masuk ke Indonesia. Namun harus diwaspadai TKA yang juga ikut masuk. Jangan sampai TKA bebas berkeliaran di Tanah Air, atau bahkan menggantikan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang itu

Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, dan memastikan dokumen yang digunakan pun resmi. "Jangan sampai justru kita malah diserbu TKA ilegal, yang merugikan kita dan pekerja lokal," pesan politisi dapil Jateng itu.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Hal itu dilakukan guna mempermudah prosedur masuknya TKA ke Indonesia dan mendukung masuknya investasi.

Kendati demikian, Direktur Pembinaan Usaha Migas Budiyanono meyakinkan TKA tidak akan membanjiri Indonesia pada kegiatan usaha migas. Pasalnya, prosedur seleksi tetap dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nantinya, Kemenaker tetap akan menyeleksi kompetensi TKA yang akan masuk ke sektor migas. Selain itu, pendampingan TKA juga akan dilakukan oleh Kemenaker dan Kementerian ESDM. ■ (ann/sf)

Demikian diungkapkan Taufik menyoroti dampak dicabutnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

"Pencabutan regulasi itu katanya untuk mendorong investasi sektor minyak dan gas bumi masuk ke Indonesia. Namun harus diwaspadai TKA yang juga ikut masuk. Jangan sampai TKA bebas berkeliaran di Tanah Air, atau bahkan menggantikan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang itu," tegas Taufik saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (5/3).

Politisi F-PAN ini juga meminta, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memastikan kompetensi tenaga kerja lokal terserap secara maksimal di sektor minyak dan gas bumi. TKA yang masuk pun diharapkan melakukan *knowledge transfer* kepada para pekerja Indonesia, sehingga kompetensinya meningkat.

"Mungkin ada kompetensi di sektor minyak dan gas bumi yang belum dimiliki oleh pekerja Indonesia. Nah, hadirnya TKA itu, seharusnya dapat memberikan *knowledge transfer* ke pekerja kita. Dengan begitu, kompetensi pekerja kita juga akan meningkat," jelasnya.

Di sisi lain, Taufik juga meminta



Agus Hermanto Kritisi Pencabutan Subsidi Listrik Masyarakat Anambas

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengkritisi keputusan dicabutnya subsidi listrik terhadap 1.375 pelanggan yang dilakukan PT. PLN Rayon Tarempa di Anambas, Kepulauan Riau. Hal tersebut menyebabkan tagihan listrik pelanggan yang membengkak, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

“Seharusnya saat mencabut subsidi listrik itu, mereka harus memikirkannya dengan matang. Terlebih jika memang ingin mencabutnya, harus dilakukan pemberitahuan mengenai informasi tersebut agar masyarakat tidak kaget nantinya saat membayar tagihan listrik,” tutur Agus kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).

Politisi Demokrat itu menyatakan, DPR menginginkan subsidi listrik untuk golongan bawah harus tetap ada, karena mereka harus diberikan suatu stimulan untuk mengurangi beban kehidupan.

DPR menginginkan subsidi listrik untuk golongan bawah harus tetap ada, karena mereka harus diberikan suatu stimulan untuk mengurangi beban kehidupan

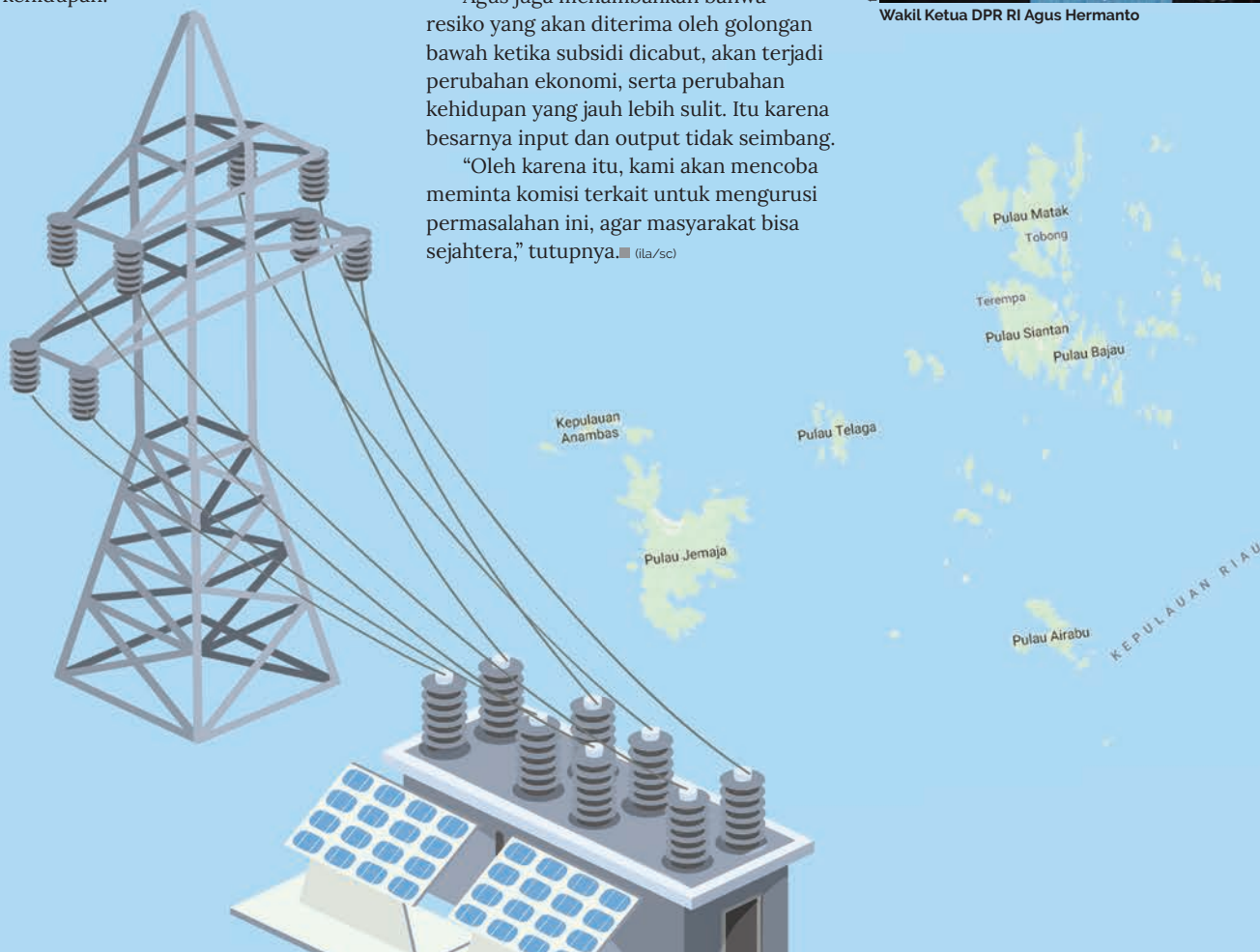
Agus juga menambahkan bahwa resiko yang akan diterima oleh golongan bawah ketika subsidi dicabut, akan terjadi perubahan ekonomi, serta perubahan kehidupan yang jauh lebih sulit. Itu karena besarnya input dan output tidak seimbang.

“Oleh karena itu, kami akan mencoba meminta komisi terkait untuk mengurus permasalahan ini, agar masyarakat bisa sejahtera,” tutupnya. ■ (ila/sc)



foto: azka/oc

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto



Presiden Harus Memiliki Penasihat Hukum Tata Negara

Desakan agar Presiden Joko Widodo memiliki penasihat hukum tata negara diserukan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Desakan ini menguat setelah Presiden Jokowi belum juga menandatangani revisi terbaru atas UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ini jadi masalah serius bila Presiden tidak juga menandatangani UU MD3.



Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah

foto: andri/jk

“Kasihan Presiden. Saya sedih melihat Presiden enggak punya penasihat tata negara. Jadi, *enggak* konstitusional, *ngalor ngidul* aja,” ucap Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (5/3). Orang-orang di sekitar Jokowi, sebut Fahri, tidak memiliki kemampuan dalam penguasaan masalah. Mereka terlihat *ngawur* dalam bekerja. Untuk itu, ia meminta Jokowi berhati-hati dalam bekerja.

“Presidennya harus hati-hati. Enggak punya penasihat tata negara sih, jadi *ngawur* gitu kiri-kanannya. Ada orang-orang jago di sekitar Presiden, tapi tidak jelas. Bahkan, sikapnya terhadap UU MD3 ini bahaya betul,” nilai Fahri. Politisi dari Bima NTB ini juga mengakui Presiden tidak memiliki ahli ekonomi, hingga keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh orang nomor satu di negara ini tidak substansial.

“Ada tantangan membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya yang sangat substantif. Ini bisa babak belur saat debat Presiden nanti,” katanya. Langkah Jokowi bisa dimuluskan saat debat Presiden nanti, bila tidak ada lawannya selain melawan ‘kotak kosong’. Namun, Fahri mengaku hal itu sulit terjadi

Presidennya harus hati-hati. Enggak punya penasihat tata negara sih, jadi *ngawur* gitu kiri-kanannya

karena kotak kosong tak bisa menghadapi manusia, selain kotak kosong menghadapi kotak kosong.

“Ya kecuali kalau lawan kotak kosong. Makanya ada yang pengen Presiden lawan kotak kosong. Bahaya dong, yang bisa lawan kotak kosong hanya kotak kosong, enggak bisa manusia,” jelasnya. ■(mh/sc)

Tren Penyalahgunaan Narkotika di Aceh Meningkat

Komisi III DPR RI mencatat, tren penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh terus meningkat. Diketahui, pada tahun 2014, terdapat tindak pidana narkoba sebanyak 1.415 kasus dengan tersangka 1.831 orang. Dan pada tahun 2016, melonjak cukup signifikan menjadi 2.188 kasus dengan tersangka 2.677 orang.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap

foto: sunya/rod

DPR Minta Pemerintah Percepat Draf Revisi UU Narkotika

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta pemerintah untuk secepatnya menyusun dan mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika yang diusulkan oleh pemerintah.

“Sekarang revisi UU Narkotika sudah masuk Prolegnas, dan itu usul inisiatif pemerintah. Sampai hari ini, pemerintah belum mengajukan drafnya ke DPR. Ada pemikiran dari parlemen untuk membuat revisi UU itu supaya bisa jadi usul inisiatif dari DPR, dan bisa lebih cepat,” ujarnya sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Politisi F-Gerindra itu mengatakan, jika pemerintah tidak cepat dan tidak siap untuk menyerahkan draf tersebut dalam waktu dekat ini, Baleg akan siap mengambil alih, dan segera melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Baleg akan meminta pemerintah supaya menyerahkan revisi UU tersebut agar menjadi usul inisiatif dari DPR.

“Kita ini sudah darurat narkotika. Dari data resmi yang masuk, kurang lebih 6 juta



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

orang yang terindikasi baik penyalahguna maupun pengedar. Tetapi menurut perkiraan saya, pasti lebih dari angka itu, mungkin di atas 10 juta orang,” tandas Supratman.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat juga meminta pemerintah untuk mempercepat revisi UU Narkotika. “Kalau pun revisi itu belum secepatnya dilakukan, setidaknya kami meminta presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” ujar Henry.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menjelaskan, setiap desa di Indonesia tidak ada yang bersih dan bebas dari narkotika. Menurutnya, setiap hari sedikitnya 50 orang meninggal dunia akibat dari penyalahgunaan narkotika.

“Ada 6 sampai 7 juta orang Indonesia yang mengalami ketergantungan dan menyalahgunakan narkotika. Kondisi ini menunjukkan bangsa kita sudah darurat narkotika. Apalagi beberapa hari yang lalu ada serbuan berton-ton narkotika yang masuk,” ungkapny.

Ia melanjutkan, China sudah mengirim ratusan ton narkotika dan tidak bisa berbuat apapun. Karena di China, memproduksi dan mengirim narkotika termasuk ke Indonesia, bukan menjadi tindak pidana. “Artinya, Bangsa Indonesia harus bicara di dunia untuk menyelamatkan bangsa kita, setidaknya dimulai di parlemen ini,” tegas politisi dapil Lampung II ini. ■ (mhr/sf)

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh dan Kepala BNNP Aceh beserta jajarannya, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (27/2).

“Sungguh kita belum maksimal untuk melakukan perang melawan narkotika. Seharusnya BNN diberikan kewenangan lebih melampaui kewenangan yang mereka miliki sekarang, semisal soal besaran anggaran yang diberikan pemerintah,” tegas Mulfachri.

Politisi F-PAN itu menambahkan, jika BNN diberi porsi anggaran yang lebih besar, itu menunjukkan komitmen pemerintah memerangi narkotika. “Saya kira, jika itu dilakukan baru kita bisa membuat kesimpulan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh

ingin memberantas narkotika di negeri ini,” tandas Mulfachri.

Mulfachri pun memaparkan data penyalahgunaan narkotika di Aceh. Pada 2014 tindak pidana narkotika sebanyak 1.415 kasus dengan tersangka 1.831 orang, barang bukti ineks 21.371 butir, sabu 11.739 gram, dan golongan IV 683.100,5 butir.

Kemudian 2015 dengan kasus 1.890 dengan jumlah tersangka sebanyak 2.335 orang dengan barang bukti ineks 22.678 butir, sabu 11.405 gram, dan golongan IV 1.230.932 butir. Sedangkan pada 2016 terungkap sebanyak 2.188 kasus dengan tersangka 2.677 orang dan barang bukti ineks 4.221 butir, sabu 9.340 gram golongan IV sebanyak 16.031.623 butir.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen. Pol. Faisal Abdul Naser mengatakan, tingginya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Aceh, karena jaringan pemasoknya sudah menyasar hampir ke semua kelompok

masyarakat.

“Seperti kelompok pelajar, mahasiswa, orang tua, bahkan di kalangan birokrat. Data yang ada juga mengungkapkan, 52 persen sampai 75 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di Aceh adalah terpidana kasus narkotika,” kata Faisal.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPR RI juga meminta penjelasan Kepala BNN Provinsi Aceh terkait dengan pagu anggaran 2018, program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi BNN di Provinsi Aceh. Komisi III DPR RI juga ingin mengetahui pelaksanaan koordinasi dan upaya nyata BNN Provinsi Aceh bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Provinsi Aceh. ■ (soe/sf)



Tim Kunker Komisi X DPR RI mengunjungi SMA 5 terkait sarana dan prasarana untuk persiapan UNBK di Banjarmasin

Foto: ma/jk

Sarpras Harus Disiapkan Hadapi UNBK

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kesiapan dan persiapan sarana prasarana (sarpras) tingkat SMA dan SMK dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Dalam kunjungan kerja ini, kami mengikutsertakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat kejadian real yang ada di lapangan. Jadi kami tidak hanya memberi angin segar, tetapi permasalahan ini juga harus langsung diselesaikan

“ Kami melakukan kunjungan lapangan ke SMA dan SMKN 5 Banjarmasin. Keluhan yang kami terima adalah kurangnya komputer untuk menghadapi UNBK, permasalahan ini harus menjadi perhatian,” ungkap Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke SMA 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/3).

Menjawab keluhan itu, politisi fraksi PKS itu mengatakan akan menyampaikan kepada mitra kerja terkait. “Dalam kunjungan kerja ini, kami mengikutsertakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat kejadian real yang ada di lapangan. Jadi kami tidak hanya memberi angin segar, tetapi permasalahan ini juga harus langsung diselesaikan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Sekolah SMA 5 Banjarmasin sangat mengapresiasi



<https://sunartombs.wordpress.com>

kunjungan Komisi X DPR ini, dan berharap semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hadirnya DPR. “Menghadapi UNBK ini, kami masih memiliki kendala seperti kekurangan komputer. Jaringan internet dan koneksi juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya. ■ (rmm/sf)



Tim Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI menyerahkan tambahan anggaran pendidikan sejumlah Rp 828 miliar kepada Gubernur NTT

foto: ryan/jk

Komisi X Serahkan 828 Miliar untuk Pendidikan NTT

Membangun Indonesia di NTT itulah yang diharapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI. Namun masih banyak kendala untuk mendukung program tersebut, antara lain mutu guru yang masih rendah karena belum sarjana serta tidak didukung sarana prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Banyak bangunan yang sudah tidak layak dari tembok yang retak dan sudah tidak bisa dipakai ruangnya. Hal itu merupakan temuan Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa, (6/3).

“ Dalam rangka mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar Menengah (SN Dikdasmen) saya mendapatkan temuan pendidikannya kurang, sudah kurang dengan tingkat pendidikan yang rendah serta lebih dari 20 persen pendidik yang belum sarjana,” tutur Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto.

Selain itu, politisi Demokrat tersebut menuturkan, kurangnya dukungan teknologi dari jaringan internet akan

berdampak pada penyelenggaraan program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI dan Direktur Pembinaan Kemendikbud menyerahkan tambahan anggaran pendidikan sejumlah Rp 828 miliar ke Gubernur NTT Frans Leburaya untuk meningkatkan dan membenahi mutu pendidikan di NTT.

Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra.

Ia menyatakan untuk mendukung ‘Membangun Indonesia di NTT’ dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. “Untuk mendukung SDM yang membaik dan sarana prasarana nanti anggaran pendidikan akan kami tingkatkan serta saya harap Pemprov NTT memberikan informasi yang betul-betul objektif dan jangan ada yang ditutup-tutupi,” tutur Sutan.

Sementara itu, politisi F-PDI Perjuangan MY Esti Wijaya menuturkan, dengan minimnya anggaran yang ada di NTT seharusnya pemprov memiliki skala prioritas terbaik dalam pembangunan pendidikan. “Secara infrastruktur sekolah secara fisik harus diperhatikan karena untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar jangan sampai jika hujan besar sekolah akan ambruk dan akan memberikan citra buruk untuk pendidikan di Indonesia,” tutur Esti. ■ (ryan/sc)



Tim Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI meninjau Sekolah Tapal Batas di Kaltara

Komisi X Apresiasi Sekolah Tapal Batas

Tim Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI mengapresiasi Yayasan Ar-Rasyid Nunukan, yang telah menyelenggarakan Sekolah Tapal Batas, di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Sekolah ini dinilai telah menjadi media belajar anak-anak yang berada di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.



foto: sofyan/jk

Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Abdul Fikri Faqih mengatakan, kehadiran sekolah ini menjadi harapan bagi orang tua yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pasalnya, TKI yang bekerja di wilayah Malaysia itu tak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-

sekolah Malaysia. Bahkan kabarnya, sebelum adanya Sekolah Tapal Batas ini, banyak anak-anak yang tidak bersekolah.

“Kami mengapresiasi langkah Ibu Suraidah (Kepala Sekolah Tapal Batas. red) yang mendirikan Sekolah Tapal Batas ini, dengan menyelenggarakan sekolah setingkat Madrasah Ibtidaiyah. Dan untuk tingkat SMP dan SMA, dengan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengejar Paket B dan C. Ini tentunya harus mendapat apresiasi dan atensi, sehingga kita dapat membantu untuk sekolah-sekolah di perbatasan,” kata Fikri di sela-sela peninjauan Sekolah Tanpa Batas, Selasa (6/3).

Politisi F-PKS itu menilai, fasilitas pendidikan untuk anak-anak TKI di perbatasan dengan Malaysia terkesan tidak dijamin. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pendidikan yang layak menjadi hak setiap warga negara. Menurutnya, seharusnya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan di daerah perbatasan.

“Dari kunjungan ini, Panja Dikdasmen menemukan banyak fakta yang menunjukkan bahwa sektor pendidikan kita harus berbenah. Untuk mendapatkan formula yang baik untuk pendidikan di masa depan, kita harus melihat Indonesia secara utuh. Tidak hanya Jawa, tapi juga di daerah perbatasan,” tandas Fikri.

Fikri dan Tim Panja pun menemukan beberapa masalah yang dihadapi Sekolah Tapal Batas. Pertama, terkait sarana prasarana serta infrastruktur sekolah. Kendati sudah mendapatkan bantuan, namun kondisinya mesti ditingkatkan. Kemudian terkait tenaga pengajar yang dinilai minim. Sehingga diperlukan langkah dari Pemerintah Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), agar dapat meningkatkan guru untuk mengajar di daerah perbatasan.

“Usulan dari Pemprov Kaltara, untuk mengangkat dan memprioritaskan putera-puteri daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajar. Namun harus diakui, untuk mengajar di daerah perbatasan, jika tidak ada jaminan kesejahteraan, tentu tidak menarik. Sehingga tentunya harus diimbangi dengan insentif dan jaminan, serta tunjangan kemahalan,” usul Fikri.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjungan mengatakan, sekolah-sekolah di daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian khusus yang sangat serius dari pemerintah. Selain karena ada sisi politis, yakni berbatasan dengan negara tetangga,

Panja Dikdasmen menemukan banyak fakta yang menunjukkan bahwa sektor pendidikan kita harus berbenah. Untuk mendapatkan formula yang baik untuk pendidikan di masa depan, kita harus melihat Indonesia secara utuh. Tidak hanya Jawa, tapi juga di daerah perbatasan

daerah perbatasan juga menjadi cerminan Indonesia.

“Terkait sisi politis di daerah perbatasan ini, harus ada kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif, baik di daerah maupun pusat. Sehingga dalam membuat kebijakan, memiliki langkah yang sama. Ketika kebijakan yang dibuat sudah tepat dan sama sikapnya, baru kemudian teknisnya dijalankan oleh pemerintah. DPR akan mengawasi pelaksanaan teknisnya,” jelas politisi F-PG itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah Tapal Batas Suraidah mengakui, masih ada permasalahan yang dihadapi sekolah yang dipimpinnya, diantaranya minimnya guru, infrastruktur gedung, maupun minimnya koleksi buku. Akibat dari minimnya koleksi buku, literasi guru dan murid cukup rendah.

Untuk diketahui, guna meninjau Sekolah Tapal Batas di Pulau Sebatik ini memang tidak mudah. Selain jaraknya yang cukup jauh dari Tarakan, infrastruktur di beberapa titik kurang memadai. Setidaknya diperlukan hampir tiga jam perjalanan kapal dari Tarakan, menuju Pelabuhan Sungai Pancang di Pulau Sebatik. Dilanjutkan perjalanan darat hampir 1 jam menuju Sekolah Tapal Batas, dengan melewati beberapa jalanan yang kondisinya berlubang dan kontur jalanan yang rendah dan tinggi.

Kondisi cuaca di laut yang tidak bisa diprediksi, bahkan membuat kapal tidak bisa berlayar. Hal itu pun terjadi pada rombongan Komisi X DPR RI. Sedianya Komisi X DPR RI akan bertolak dari Sebatik menuju Tarakan pada Selasa (6/3) malam. Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kapal untuk berlayar, rombongan urung melanjutkan perjalanan, dan bermalam di Sebatik. Akhirnya, baru pada Rabu (7/3) pagi, rombongan Komisi X DPR RI dapat berlayar menuju Tarakan.

■ (sf/sc)



Tim Panja Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI meninjau sejumlah sekolah di Provinsi Papua.

foto: eka/jk

Standar Nasional Dikdasmen Harus Mampu Hasilkan Lulusan yang Baik

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua Ferdiansyah mengatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) harus mampu menghasilkan lulusan yang baik dan mampu menghadapi tantangan, serta tuntutan perubahan kehidupan lokal.

“Tujuan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah dimaksudkan agar setiap satuan pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan,” ucap Ferdi di Sentani, Papua, Selasa (6/3).

Pada kesempatan tersebut, Tim Kunspek Panja Dikdasmen Komisi X DPR juga melakukan peninjauan langsung kegiatan belajar dan mengajar di SMKN 1 Sentani, Provinsi Papua. “Kondisi sarana dan prasarana SMKN 1 Sentani sangat memprihatinkan,” ujar Ferdi usai meninjau kondisi fisik SMKN 1 Sentani.

Ferdi menyampaikan, tujuan kedatangan anggota Komisi X DPR ke

Provinsi Papua adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai capaian standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

“Dari kunjungan ini kami menyimpulkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, sehingga harus mampu berdaya saing dengan negara lainnya,” ungkap ferdy.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Sentani Uloh Saefullah berharap dengan kunjungan Komisi X DPR itu dapat

membawa perubahan. Menurutnya, saat ini mereka masih kekurangan tenaga guru bidang studi produktif. “Memang secara kuantitas sudah terpenuhi, tetapi secara kualitasnya masih sangat kurang. Sarana dan prasarana sekolah juga masih sangat jauh,” kata Uloh. ■ (thr/dep)



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

foto: artef/jk

“Menurut pendapat saya larangan bercadar sungguh berlebihan dan tergesa gesa,” ungkap legislator FPPP dalam percakapannya dengan awak media, Rabu (7/3) di Komplek Parlemen,

Legislator Tak Setuju Moratorium Proyek Infrastruktur

Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamajido menyatakan tidak setuju pemerintah melakukan moratorium proyek infrastruktur. Itu bukan jalan keluar, jalan keluarnya adalah pemerintah melakukan pengawasan sebelum pelaksanaan dimulai dan dan sesudah pelaksanaan proyek. Itu adalah standar operasional prosedur (SOP) sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan.



Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamajido

“ Pengawas itu melakukan cross check sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek dan ada berita acaranya. Artinya setelah meeting poin dilakukan apakah semua telah berjalan sesuai standar kerja. Bila dikatakan siap, masih tetap harus dicek,” tandasnya dengan menambahkan, kalau pengawasan ini tidak dilakukan, di situlah awal dari terjadinya bencana itu.

Ditemui awak media, Rabu (7/3) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rendy menyebutkan bahwa dalam UU Jasa Kontruksi disebut dengan jelas pengaturan sumber daya manusia itu diserahkan kepada masyarakat kontruksi melalui suatu lembaga yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi. Namun dalam UU yang telah direvisi, lembaga ini hilang padahal mestinya independen.

Dalam UU sebelumnya, lanjut Rendy, lembaga ini kurang menjalankan fungsinya, mereka hanya terjebak pada

persoalan akreditasi dan sertifikasi. Padahal tugas lembaga tersebut ada lima poin diantaranya bagaimana melakukan proporsionalitas SDM. “Ini kurang dilakukan. Bukan kelemahan UUnya, tapi lembaganya. Bahkan pemerintah mulai mendominasi. Ini salah,” tukasnya.

Menurut Rendy, di negara manapun yang melakukan pengerjaan proyek adalah masyarakat. Munculnya profesionalisme adalah karena kemandirian, tidak akan profesional kalau tidak mandiri. Karena itu dia mendesak, lembaga yang menjadi amanat UU dan kini diubah permen, diperkuat lagi sehingga bisa memayungi masyarakat kontruksi termasuk melakukan pembinaan jasa kontruksi.

Lebih lanjut dia mengatakan, sekarang ini pembinaan SDM diambil alih oleh pemerintah, ini salah. Pemerintah mestinya bersikap sebagai regulator dan operasional diserahkan kepada masyarakat kontruksi sendiri. “Kalau pemerintah

sudah menjadi regulator, jadi penyedia, pengguna dan pelelang tender sekaligus menjadi wasit, maka kacau. Tidak ada keseimbangan dalam pengawasan,” ia menambahkan.

Sekarang, kata Rendy banyak kontraktor yang melampaui kemampuan dasarnya (KD), atau kemampuan dirinya. Ini salah satu faktor yang menimbulkan kegagalan kontruksi. Artinya sudah lelah, kebanyakan proyek sehingga tidak fokus dan konsentrasi karena tidak berdasarkan KD ini. Akibatnya banyak *engineer* kelelahan akhirnya terjadi kegagalan kontruksi. ■ (mp/mhr).

SOAL LARANGAN CADAR Berlebihan dan Tergesa-gesa

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim menilai dalam mensikapi larangan bercadar di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperlukan kedewasaan dalam menanggapi.

Senayan, Jakarta.

Anggota dewan di komisi yang membidangi agama dan sosial ini melanjutkan, dalam konteks individu atau kelompok orang yang beragama Islam tentu amat mafhum dan maklum tentang adanya perbedaan-perbedaan baik berbeda dalam tata cara beribadatnya maupun berbeda dalam tata laku kehidupannya.

“Hal tersebut karena dalam pemahaman Islam ada *firqoh-firqoh* dalam jumlah banyak,” jelasnya. Karena itu kata

Mustaqim, seharusnya pemerintah tidak bisa dan tidak boleh masuk ke ranah yang sangat privat. Apalagi terkait dengan keyakinan dalam beragama dengan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di negeri yang sangat majemuk ini.

Ditambahkan, amanat konstitusi pasal 29 jelas memberikan hak kebebasan beragama yang secara otomatis dengan segala aturan turunannya tidak boleh bertentangan. “Kita perlu mencermati dengan seksama antara hak kebebasan beragama dalam konteks ritual prinsip

peribadatan dan konteks keseharian yang mencerminkan keagamaan seseorang sesuai keyakinannya. Di titik inilah kebebasan seseorang atau kelompok harus diimbangi hak seseorang atau kelompok lainnya,” demikian Mustaqim.

Diwartakan sebelumnya, UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di kampus. Mahasiswinya diminta pindah kampus bagi yang tak mau melepas cadar saat beraktifitas di kampus.

Wakil Rektor UIN Suka Sahorin Syamsudin mengatakan, pelarangan cadar ini tak lepas dari alasan pedagogis. “Jika mahasiswi pakai cadar dalam kelas, para dosen tentu tak bisa membimbingnya dengan baik dan pendidiknya tak dapat mengenali wajah mahasiswinya. Di kelas pakai cadar, kan dosen tidak bisa mengenali apakah yang di kelas itu mahasiswi atau bukan,” kilahnya. ■ (mp/sc)



Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau Puskesmas di Papua Barat

Perlu Pembenahan Untuk Tingkatkan Pembangunan Papua Barat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menyampaikan agar akselerasi pembangunan Papua Barat meningkat secara progresif dibutuhkan pembenahan seluruh aspek serta perencanaan yang lengkap di bidang infrastruktur kesehatan dan tenaga kerja. Namun, menurut Syamsul, penyerapan anggaran menjadi kendala dalam pembenahan pembangunan di Papua Barat.

“Jika daya serap daerah sangat rendah, banyak besaran anggaran turun. Sehingga, masalah-masalah ini harus dibenahi agar pembangunan di Papua Barat lebih baik,” tegas Syamsul saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Papua Barat, di Kantor Gubernur

Papua Barat, Kamis (1/3).

Diketahui, lambatnya penyerapan anggaran di daerah menjadi permasalahan krusial karena berdampak pada percepatan pembangunan yang berlangsung. Di sisi lain, saat ini, pembangunan di beberapa daerah sangat sulit karena keterbatasan

akses. Dengan tidak terserapnya APBD, maka akan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah.

Pertemuan Tim Kunker Komisi IX dengan Pemrov Papua Barat digelar di Kantor Gubernur dengan dihadiri kepala Kepala Dinas Kesehatan, Kepala



foto: doeh/jk

Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan POM, Kepala BKKBN dan Kepala BP3TKI serta direktur RSUD Manokwari. Komisi IX menginventarisasi persoalan-persoalan di Papua Barat yang ada, poin pertemuan nantinya menjadi rumusan dalam rapat bersama dengan Pemerintah.

Tim Kunker Komisi IX ingin menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN di Provinsi Papua Barat. Kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna melihat perkembangan pembangunan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan BPOM. Komisi IX juga memonitor pelaksanaan dan program kementerian serta lembaga negara yang menjadi mitra kerja Komisi IX. ■ (dn/sf)



foto: runi/od

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron

DPR Kritisi Pencabutan Permen ESDM tentang TKA

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengkritisi pencabutan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam sektor Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, hal itu akan mengurangi peluang yang semestinya menjadi hak dari anak-anak bangsa Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.

“Saya pribadi tidak setuju dengan pencabutan Permen tersebut. Dan jika memang benar adanya, bisa mempermudah tenaga asing masuk ke Indonesia, terlebih dalam sektor migas. Hal ini patut untuk kita kritisi bersama,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Herman menambahkan, jika peluang lapangan kerja di sektor migas diisi oleh tenaga kerja asing, hal ini sama saja dengan menggadaikan negeri sendiri untuk pihak asing. “Lantas bagaimana dengan hajat hidup bangsa dan negara ini, dengan penduduk sekitar 260 juta jiwa, jika mencari kerja saja susah,” ujarnya

Politisi F- P Demokrat ini juga berpendapat bahwa tenaga kerja Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang sudah mumpuni, dimana kualifikasinya sudah terpenuhi.

“Coba datang saja ke seluruh pengeboran atau mining, semuanya tenaga kerja dari negeri kita sendiri yang sudah berkontribusi langsung ke dalam pekerjaan yang *high tech*, *high risk*, dan *high qualification*. Ketiga kriteria tersebut, menurut saya sudah mampu untuk ditempati oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia,” tambahnya.

Herman menyatakan, sangat tidak tepat jika hal ini sengaja dicabut hanya untuk menjadi alasan mempercepat investasi dan reformasi regulasi. Karena bagaimanapun, keberpihakan kepada rakyat dan anak-anak bangsa, harus menjadi prioritas, serta kemampuan dari seorang pemimpin negara untuk bisa memberikan ruang yang cukup dan memadai bagi tenaga potensial dalam negeri. ■ (ila/sf)

Rufinus Puji Kebijakan Sultan Cegah Penguasaan Tanah

Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menjelaskan, kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melarang non pribumi memiliki hak milik tanah merupakan sebuah bentuk perlindungan kepada warga dan tidak ada sama sekali unsur diskriminatif. Selain itu Yogya memiliki sejarah panjang tentang keistimewaan daerahnya sejak zaman kolonial, oleh sebab itu Kesultanan Yogya berhak menentukan arah pemerintahannya.



Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk

Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini justru memuji kebijakan Sultan Hamengku Buwono X yang mencegah praktik penguasaan tanah oleh investor. “Karena Sultan juga harus menjaga kepentingan masyarakat Yogya,” tandas Rufinus dalam keterangan persnya, Senin (5/2).

DIY sebagai daerah khusus memiliki kewenangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, termasuk soal pertanahan. Rufinus pun menampik soal isu rasialisme kepemilikan tanah di DIY. “Kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ini justru memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah. Bahwa hak yang diberikan merupakan HGB (Hak Guna Bangunan),” paparnya.

Menurutnya Komisi II DPR justru menginginkan adanya penguatan atas status kepemilikan tanah di DIY sebagai daerah khusus. “Sehingga ke depannya, persoalan pertanahan di Yogya tidak mencuat kembali karena memiliki payung

hukum yang kuat,” jelasnya.

Dia menambahkan, DIY dalam soal kepemilikan tanah tidak tunduk pada

Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Maka dari itu, kebijakan Instruksi Kepala Daerah 898/1/A-1975 tentang penyeragaman kebijakan pemberian hak atas tanah kepada WNI non pribumi masih berlaku.

Dia mengaku prihatin atas munculnya isu rasisme atas kepemilikan tanah setelah penggugat kebijakan Sultan Yogya kalah di pengadilan. Dia menilai istilah rasisme kepemilikan tanah ini berlebihan dan sangat tidak benar.

“Karena status kepemilikan tanah di DIY adalah HGB maka ketika terjadi sengketa tidak bisa disita. Sebab, pemilikinya adalah pemerintah yang dalam hal ini Keraton Kasultanan dan Pakualaman. Contohnya, bila masuk investor punya HGB, bersengketa lalu disita, tidak boleh. Karena tanah itu adalah aset Keraton atau Pakualaman,” ungkapnya.

Dia menduga munculnya isu diskriminasi pertanahan DIY terkait dengan kepentingan investasi dan investor. Dia menyebut investor menginginkan status kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM). “Kalau scheme tanahnya hak milik kan ujung-ujungnya bisa dijamin ke bank,” ujarnya. ■ (eko/sc)

DPR Sesalkan Rencana Pencabutan Subsidi Benih

DPR RI menyesali sikap pemerintah yang berencana akan mencabut subsidi benih. Adapun subsidi benih yang dicabut itu adalah subsidi untuk jagung, padi dan kedelai. Pencabutan subsidi benih itu dinilai akan mengganggu dan menghambat program pemerintah untuk swasembada di tahun 2020.

“Komisi IV DPR meminta agar subsidi benih tersebut tetap dapat diberikan, dalam rangka memenuhi target Kementerian Pertanian yang ingin mencapai swasembada pangan di tahun 2020,” tegas Anggota Komisi IV

DPR RI Fauzih H. Amro di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pertanian, agar tidak dilakukan pencabutan terhadap masalah



foto: jaksa/jk

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

Gubernur BI Harus Punya Relasi Luas

Seiring dengan akan berakhirnya masa kerja Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), maka Gubernur BI yang baru diharapkan memiliki akses relasi luas dengan para gubernur bank negara-negara asing lainnya. Pada Mei tahun ini BI akan memiliki gubernur baru.



Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate sesaat sebelum Rapat Paripurna di DPR, Senin (5/3), mengungkapkan, Pimpinan DPR sudah menerima kandidat nama Gubernur BI yang baru. Komisi XI DPR pasti diserahkan tugas untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Gubernur BI itu.

“Gubernur BI harus punya relasi yang baik dengan mitra-mitra kerja gubernur bank dunia lainnya,” kata Johnny. Relasi dengan gubernur bank dunia lainnya, sambung Johnny adalah dengan para gubernur bank di negara-

negara ASEAN, gubernur bank di Amerika, dan Eropa. “Komisi XI DPR yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan pasti akan independen,” kilah politisi Partai Nasdem ini.

Ia mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya, Presiden Joko Widodo kemungkinan mencalonkan Perry Warjiyo mantan Deputy Gubernur BI. Johnny menilai, Perry sangat layak dan kompeten menduduki kursi Gubernur BI yang baru menggantikan Agus Martowardojo. ■ (mh/sc)

Relasi dengan gubernur bank dunia lainnya, sambung Johnny adalah dengan para gubernur bank di negara-negara ASEAN, gubernur bank di Amerika, dan Eropa.

Subsidi benih itu diperlukan untuk menopang sektor pertanian. Apabila dilakukan pencabutan maka akan berdampak pada produktifitas pertanian

subsidy benih, karena hal tersebut akan berdampak langsung kepada petani.

“Dalam masa sidang ini, kita akan memanggil beberapa Kementerian terkait, supaya subsidi ini tidak dilakukan pencabutan dahulu, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan,” tandasnya.

Fauzih menegaskan, untuk seluruh



foto: arief/rod

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H. Amro

subsidy yang berkaitan dengan bidang pertanian, pemerintah harus melakukan kebijakan yang sangat hati-hati, agar swasembada pada tahun 2020 dapat terealisasi.

“Subsidi benih itu diperlukan untuk menopang sektor pertanian. Apabila dilakukan pencabutan maka akan berdampak pada produktifitas pertanian,” tegas politisi Fraksi Hanura tersebut ■ (dep/sf)



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerahkan palu simbolik kepada Aria Bima sebagai pimpinan baru di MKD DPR RI

Aria Bima Wakil Ketua MKD Baru

Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Aria Bima resmi menduduki posisi barunya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Yulian Gunhar. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerahkan palu simbolik kepada Aria Bima sebagai pimpinan baru di MKD DPR RI.

Prosesi pergantian berlangsung singkat di ruang MKD DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3), usai Rapat Paripurna. Aria Bima yang Anggota Komisi VI ini resmi pula mengenakan baju kehormatan sebagai Pimpinan MKD yang baru. Aria Bima berasal dari dapil Jawa Tengah V. Sedangkan Yulian Gunhar sendiri merupakan Anggota Komisi VI DPR dapil Sumatera Selatan II.

Hadir pula menyaksikan pelantikan Aria Bima ini Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad dan para pimpinan serta anggota MKD lainnya, seperti Syarifuddin Suding, Adies Kadir, TB. Soemandjaja, Daeng Muhammad, Muhammad Syafi'i, dan Agung Widiantoro. ■ (mh/sf)



Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) BKSAP DPR RI ke Provinsi Aceh berdialog dengan Gubernur Dermawan dan jajaran SKPA, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (6/3).

"Kami juga ingin mendengar dari SKPA Provinsi Aceh apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, apa yang harus diperjuangkan di tingkat pusat," ujar Nurhayati dalam sambutannya.

Politisi Demokrat ini lebih lanjut menjelaskan bahwa DPR RI melalui BKSAP terus memperjuangkan pembangunan berkelanjutan di berbagai kancha internasional mewakili Indonesia. Panja SDGs BKSAP menjadi gerbang diplomasi parlemen dan *focal point* DPR RI dalam berbagai kerja sama



foto: oclje/od

Ketua Tim Panja SDGs BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dan anggota berfoto bersama Sekda Pemprov Aceh dan jajaran SKPA

Panja SDGs Harapkan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Aceh

Ketua Tim Panja SDGs Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengharapkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai bidang di Provinsi Aceh.

nasional dan internasional mengenai SDGs.

“Kami berharap pada pertemuan ini ada perwakilan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha dan elemen lainnya. Panja SDGs sudah berjalan sejak 2015, 3 tahun bekerja sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Bappenas, Kemenlu, Kemenkes, Kemen Pemberdayaan Perempuan mengenai berbagai upaya pembangunan berkelanjutan,” ungkap Nurhayati.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

di Aceh, lanjut Nurhayati sudah lumayan bagus namun personel jajaran SKPanya masih banyak laki-lakinya, sementara dari kalangan perempuan masih belum banyak, sehingga perlu upaya serius untuk peningkatan SDM dari kalangan perempuan.

Mewakili Gubernur Aceh yang berhalangan hadir, Sekda Provinsi Aceh Dermawan mengapresiasi dukungan Panja SDGs BKSAP dalam mengawal sekaligus mengawasi program-program pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.

“Kami berharap kehadiran Panja SDGs

BKSAP bisa membantu mendorong parlemen dunia memberikan apresiasi dan kompensasi atas terjaganya biosfer serta hutan di Aceh dengan pembiayaan perawatan dan pengelolaan hutan,” pungkasnya.

Panja SDGs BKSAP DPR RI dipimpin Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, diikuti antara lain: Siti Hediati Soeharto (Watua BKSAP), Rofi Munawar (Watua BKSAP), Nurhayati Monoarfa (Watua BKSAP), Ono Surono, Andi Achmad Dara, Sareh Wiyono, Heri Gunawan, Siti Masrifah dan Amelia Anggraini. ■ (gji/sc)

Indonesia - Australia Saling Membutuhkan

Hubungan Indonesia dan Australia mempunyai sejarah yang panjang dan kerap diwarnai ketegangan, namun dalam kurun dua tahun terakhir hubungan kedua negara tersebut dinilai semakin membaik. Sejatinya, kedua negara bertetangga ini saling membutuhkan.

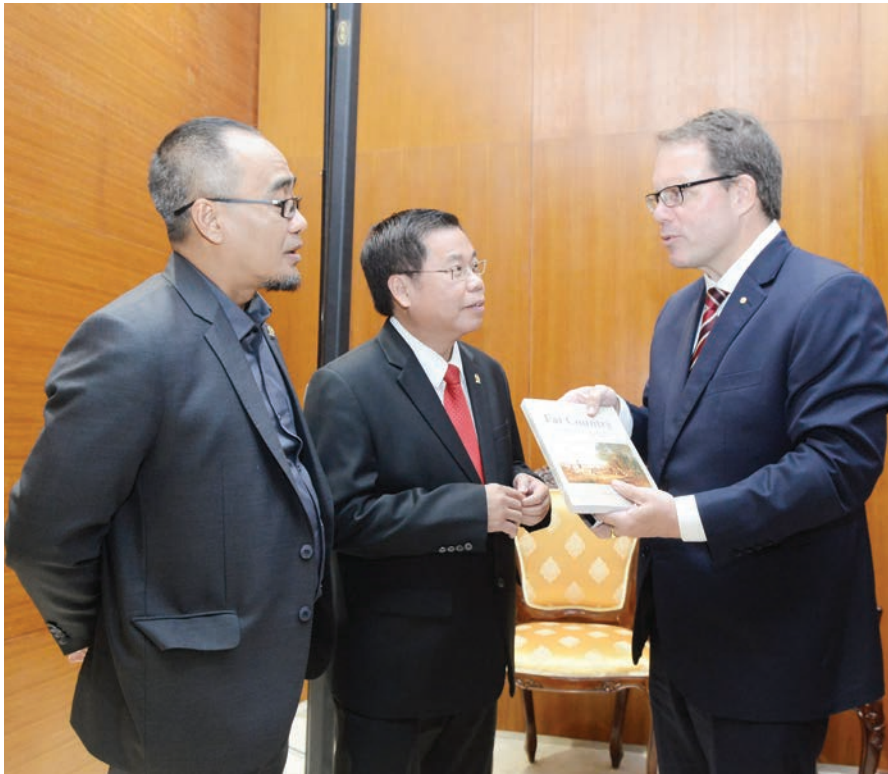


foto: tami/jk

Wakil Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Australia Sofyan Tan saat menerima kunjungan Delegasi Parlemen Australia dari Partai Buruh

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Australia Sofyan Tan saat menerima kunjungan Delegasi Parlemen Australia dari Partai Buruh yang dipimpin Luke Gosling di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (5/3).

“Kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Memang hubungan Indonesia - Australia naik turun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, hubungan semakin membaik, banyak kesalahpahaman yang bisa dieliminasi,” papar Sofyan, yang didampingi anggota GKSB DPR RI Dadang Rusdiana.

Politisi F-PDI Perjuangan ini mengatakan, Indonesia adalah mitra penting Australia dalam bidang hubungan

luar negeri, ekonomi dan perdagangan, pertahanan dan keamanan serta pendidikan dan kebudayaan. Di bidang pendidikan terutama vokasi, Australia merupakan mitra strategis untuk meningkatkan keterampilan bagi Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa.

“Kami sepakat Indonesia - Australia saling mendukung di bidang pendidikan dan pariwisata. Terutama pendidikan di Indonesia sangat konsen terhadap pendidikan vokasi, dan di Australia pendidikannya cukup maju. Kita ingin menjajaki hubungan pendidikan vokasi, karena maju pesat di dalam hal itu, tidak ada perbedaan gender, pekerjaan terampil juga dapat dikerjakan wanita,” ujar Sofyan.

Sementara, masih dilanjutkannya, terkait bidang pariwisata, Indonesia sudah seperti rumah kedua bagi warga Australia, teristimewa di Bali yang masih menjadi lokasi favorit turis dari Australia. Terlebih lagi, pemerintah saat ini sedang mengembangkan 10 destinasi unggulan lainnya yang berpotensi menjadi destinasi baru.

“Kita memberitahukan bahwa turis Australia tidak hanya berkunjung ke Bali, tetapi ke destinasi lainnya yang tak kalah eksotis seperti Labuan Bajo dan beberapa delegasi sudah berkunjung ke sana dan mengakui keindahannya,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga beberapa isu-isu lain seperti lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Delegasi dari Parlemen Australia Luke Gosling menyinggung soal limbah sampah plastik di lautan yang dapat merusak ekosistem laut. Ia menginginkan ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sofyan mengatakan diperlukan *concern* pemerintah terhadap masalah pencemaran lingkungan tersebut. Namun, menurutnya permasalahan tersebut bukan hanya tugas pemerintah Indonesia semata-mata, tetapi masyarakat bahkan turis juga harus diberikan edukasi agar tidak membuang sampah sembarangan.

“Isu sampah plastik ini adalah promosi yang buruk jika terus berlangsung. Karenanya harus ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap hal itu,” tandas politisi dapil Sumut itu. ■ (ann/sf)



Kami sepakat Indonesia - Australia saling mendukung di bidang pendidikan dan pariwisata. Terutama pendidikan di Indonesia sangat konsen terhadap pendidikan vokasi, dan di Australia pendidikannya cukup maju

PIA DPR Kunjungi Korban Tanah Longsor di Bogor

Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menggelar bakti sosial ke korban tanah longsor di Desa Tugu Selatan, Kampung Naringgul Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

“ Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu daerah Cisarua, Bogor ini terkena musibah tanah longsor. Musibah ini sempat mengakibatkan jalan desa dan belasan rumah warga rusak, bahkan juga merenggut korban jiwa. Kami turut berduka atas musibah tersebut,” ujar Ketua PIA DPR RI Leni Bambang Soesatyo usai menyerahkan bantuan di Desa Tugu Selatan, Kampung Naringgul Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/3).

Dilanjutkan Leni, sebagai wujud keprihatinan dan kepeduliannya, PIA DPR RI mengunjungi dan ikut memberikan

sedikit bantuan. Tidak lain dan tidak bukan semata untuk menghibur dan membantu meringankan beban para korban.

Ditambahkan Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon, adapun bantuan tersebut adalah berupa material bangunan seperti pasir, semen, dan besi (bronjong) yang bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa yang rusak. Serta bisa digunakan untuk membantu memperbaiki rumah warga yang menjadi korban bencana tanah longsor. Tidak hanya itu PIA DPR RI juga memberikan alat tulis dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak.

“Bakti sosial ini kali ini merupakan

acara spontan yang digelar karena adanya bencana atau musibah. Dengan kata lain baksos kali ini di luar program sosial yang telah disusun PIA sebelumnya. Alhamdulillah meski memasuki tahun politik seluruh PIA DPR RI kompak baik menjalankan program-program rutin PIA, maupun acara sosial yang belatar belakang adanya bencana atau musibah,” jelas Grace.

Baik Leni, maupun Grace yang didampingi beberapa anggota PIA DPR RI lainnya seperti Leti Roem Kono, Ade Hafidz Tohir, Latifah Mahfudz Abdurrahman, Fitri Aboebakar, Fira Akbar Faisal, Vanty Donny Okoer, dan Fadila Hatta berharap agar bantuan atau sumbangan yang diberikan PIA tersebut dapat diterima dengan baik, dan dapat bermanfaat bagi warga kampung Naringgul, Cisarua, Bogor ini.

Lebih lanjut Leni dan Grace berharap agar bencana tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih arif lagi dalam menyikapi alam dan lingkungan. (ayu/sc)



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI mengunjungi korban tanah longsor dan bakti sosial di Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima perwakilan PT. Freeport Indonesia terkait masalah ketenagakerjaan di Ruang Kerja Pimpinan DPR RI, Rabu (7/3). FOTO: JAYADI



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon menerima delegasi Parlemen Iran perihal pengembangan dan peningkatan kerjasama hubungan Indonesia - Iran di berbagai bidang di Ruang Tamu Pimpinan DPR, Kamis (8/3). FOTO: RUNI



Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR Dossy Iskandar Prasetyo mengenai RUU tentang Sumber Daya Air dari Komisi V DPR di Ruang Rapat Baleg DPR, Rabu (7/3). FOTO: AZKA